



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-1039.KP.10.02 TAHUN 2022

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan telah lulus Uji Kompetensi untuk dapat dinaikkan dalam jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1103/M.SM.01.00/2022 tanggal 30 Mei 2022 hal Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Penyuluh Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Agustus 2022

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
5. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : SEK.2-1039.KP.10.02 TAHUN 2022

TANGGAL : 05 Agustus 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	SUDIHASTUTI, S.H. NIP. 197912112002122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	218, 86
2.	KADEK DE ADNYANA, S.H. NIP. 198112142002121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	207, 75
3.	FIRMAN DWIPINTO PATTOPANG, S.H., M.H. NIP. 199105132010121004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	207,25
4.	ROBI AWALUDIN, S.H. NIP. 198910122009121003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	207, 11
5.	ROSDIANA FELTY SIREGAR, S.H. NIP. 198502212005012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	205,62
6.	RIKA BERLIANTI, S.H., M.H. NIP. 199105132010122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	203, 87
7.	ABI ANAS, S.H.I. NIP. 198704292010121002	Penata (III/c)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	202, 02
					8. . .

1	2	3	4	5	6
8.	MAMAN WIRA ATMAJA, S.H. NIP. 198012062000031001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	201,52
9.	RIJAL, S.H.I. NIP. 198107172010121001	Penata (III/c)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali	201,03
10.	TETI FRIANDARI, S.H. NIP. 198707052006042001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung	200,88
11.	SIRLY ANGRAINI, S.H. NIP. 199007252010122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi	200,80



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002